RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2013

MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-68 DAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RAPBN TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-68 DAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RAPBN TAHUN ANGGGARAN 2014

Hari : JUM'AT
Tanggal : 16 Agustus 2013
Waktu : Pkl. 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-68 Tahun 2013, (skors);
3. Skorsing (Sholat Jum'at)
4. Mendengarkan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan.
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

IV. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

V. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 5 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 34 orang

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 3 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : Ir. H. SUNARTO

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Rekan-rekan Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Staf Ahli Bupati Rembang.
Yang saya hormati	Asisten Sekda Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Kepala Badan, Dinas, Bagian Setda, Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-68 Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Rekan-rekan Wartawan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Undangan lain yang berbahagia.

Sebagai warga negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiratNya, atas segala limpahan rahmat dan nikmah-Nya, sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 16 Agustus 2013, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan kenikmatan yang tiada terbilang sehingga dapat menghadiri acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda pokok "Mendengarkan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-68 Republik Indonesia dan Mendengarkan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan ".

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati

Sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor B-1156/Kemsetneg/Setmen/TU.00/05/2013, tanggal 16 Mei 2013, Perihal : Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2013 ini diperingati dengan Tema Pokok " ***Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*** ".

Selanjutnya mengacu acara pokok yang diselenggarakan oleh DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah , maka sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang beserta perwakilan dari pihak eksekutif, disepakati bahwa Rapat Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan agenda pokok " ***Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tentang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-68 Tahun 2013***" kemudian dilanjutkan dengan " ***Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya***" setelah skorsing (shalat jum'at) selesai. Untuk itu hadirin yang telah menerima undangan baik dari DPRD Kabupaten Rembang maupun Panitia HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Rembang agar menyesuaikan.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati

Sebelum melangkah lebih lanjut, perkenankan kami para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada kesempatan ini mengucapkan "***Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 syawal Tahun 1434 H mohon maaf lahir dan bathin "*** serta mengucapkan " ***Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-68 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia"***. Semoga dalam perjalanan

waktu merdeka yang telah 68 tahun ini, bangsa dan Negara Republik Indonesia lebih dewasa dan semakin sukses dalam mengantarkan rakyat Indonesia untuk meraih cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Peserta rapat yang berbahagia.

Dengan memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan kita ini, kami berharap semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kita pada Tanah Air dan Bangsa, lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan Negara, dengan menjaga stabilitas politik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan untuk masyarakat Rembang pada khususnya.

Jika kita mengenang perjuangan para Pahlawan tahun 1945 maka terlintas jelas di benak kita bahwa semangat pertempuran yang bagaikan api yang tak kunjung padam itu begitu hebat menyatu pada para pahlawan pejuang 45 itu. Namun demikian tak kalah pentingnya dengan peran kita semua sekarang ini . Perjuangan belumlah selesai. Korban telah banyak berjatuhan maka marilah kita tingkatkan terus jiwa dan semangat 45, dengan mewujudkan jiwa pembangunan yang tangguh demi kesejahteraan rakyat.

Jiwa dan semangat 45 ialah jiwa dan semangat kebersamaan. Jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan golongan, untuk itu kita wajib meningkatkan rasa solidaritas berbangsa dan bernegara sehingga stabilitas Politik dapat terjaga.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

disebutkan bahwa " Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan". Dengan demikian Rapat ini tidak disyaratkan harus kuorum, sehingga dapat kita mulai tanpa memperhitungkan jumlah anggota Dewan yang hadir.

Selanjutnya dengan mengucap " ***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 09.40 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelum kita memasuki acara pokok maka terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-68 Tahun 2013, (skors);
3. Skorsing (Sholat Jum'at)
4. Mendengarkan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan.
5. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara kedua yang merupakan agenda pokok yang pertama hari ini, yaitu ***"Mendengarkan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-68".*** Untuk itu rapat saya skors, untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

= MENDENGARKAN PENYAMPAIAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-68=

Rapat Dewan yang saya hormati.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Presiden, dapat kita pahami secara seksama dalam hati sanubari kita serta dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya agar dalam kita melaksanakan tugas kita masing-masing dapat mencapai keberhasilan sehingga dampaknya terhadap pembangunan Kabupaten Rembang ke depan lebih positif dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Rembang diberbagai sektor.

Rapat Dewan yang saya hormati.

Sehubungan Penyampaian Pengantar/Keterangan dari Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan dilaksanakan pada Pukul 14.30 WIB dan bertepatan dengan hari Jum'at dimana umat muslim mempunyai kewajiban utuk menunaikan sholat Jum'at, maka Rapat kami skors sampai pukul 14.00 WIB.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Rapat Dewan yang saya hormati.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Selanjutnya kita masuk acara ke-4 (empat) acara pokok yang kedua yaitu " Mendengarkan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangan ". Untuk itu

rapat saya skors, untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

" ***MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RAPBN TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA NOTA KEUANGAN*** "

Rapat Dewan yang saya hormati.

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk Palu 1 Kali)

Demikian telah kita dengarkan bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Peserta Rapat yang saya hormati.

Demikian rangkaian acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia telah usai, serta dapat berjalan lancar tanpa aral suatu apa. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, mohon maaf apabila dalam memimpin Rapat Paripurna Istimewa hari ini terdapat kekurangan dan kekhilafan.

Namun untuk mengenang dan tetap menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita terhadap perjuangan para pendahulu kita, marilah kita kumandangkan pekik kemerdekaan sebagai motivasi dan penggugah semangat juang kita : .."**MERDEKA**" !! *(berteriak sambil mengepalkan tangan).*

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucap "***Alhamdulillahirobbil'alamin***" tepat pukul 16.20 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk Palu 3 Kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-68 DAN PENGANTAR / KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RAPBN TAHUN ANGGGARAN 2014

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD se-Kabupaten Rembang ;

LAMPIRAN II : Teks Pidato HUT Republik Indonesia ke – 68 dibacakan oleh Presiden;

LAMPIRAN III : Teks Pidato Penyampaian Keterangan RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 68 DAN PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU APBN TA 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
	FRAKSI DEMOKRAT		
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1
2	H. HARNO, SE	Anggota	2
3	GUNASIH, SE	Anggota	3
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8
	FRAKSI PARTAI GOLKAR		
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9
10	H. ISMARI	Anggota	10
11	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	11
12	JOKO SUSILO	Anggota	12
13	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	13
14	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	14
15	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	15
16	SRI REJEKI, SH	Anggota	16
	FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17
18	H. SA'DULLAH	Anggota	18
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23
	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA		
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26
27	PUJI SANTOSO, SP MH	Anggota	27
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
	FRAKSI PERJUANGAN		
31	JASMANI	Anggota	31
32	SUPRIHADI	Anggota	32
33	SUMARSIH	Anggota	33
34	RIDWAN, SH, MH	Anggota	34
35	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	35
	FRAKSI AMANAT NASIONAL		
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36
37	H. MOH. NURHASAN, SH	Anggota	37
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38
39	SUKARMAIN	Anggota	39
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40
	FRAKSI BINTANG KEADILAN		
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43
44	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
K E T U A

Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA HUT RI KE - 68
DAN PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG
APBN TA 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2013
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. .....
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. .....
3.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	3. .....
4.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	4. .....
5.	.....	Dandim 0720 Rembang	5. .....
6.	.....	Kepolisian Resort Rembang	6. .....
7.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. .....
8.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	8. .....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

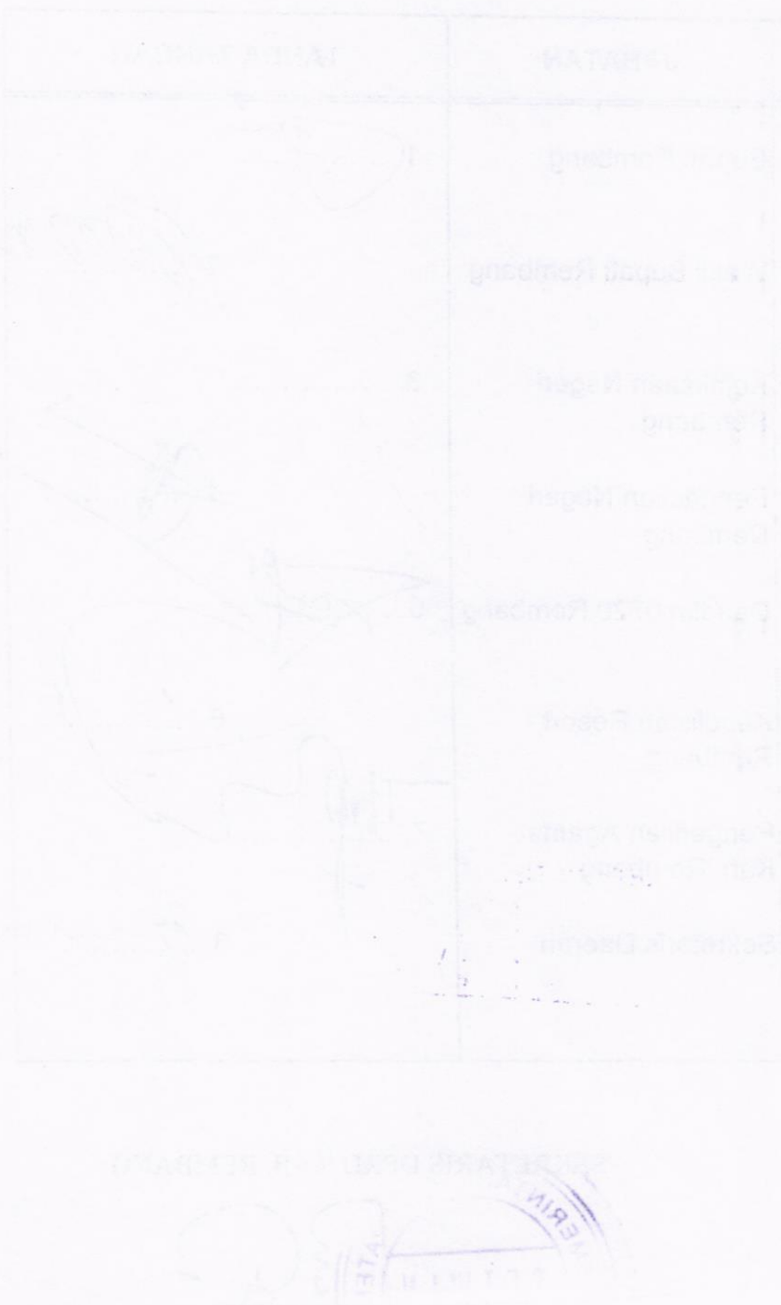

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA HUT RI KE - 68
DAN PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG
APBN TA 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2013

PUKUL : 09. 00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1	
2	Camat Kaliori	MUSTHOLIH		2
3	Camat Sumber		3	
4	Camat Sulang			4
5	Camat Bulu	SUSWANTORO	5	
6	Camat Pamotan	M. WIYOTO		6
7	Camat Gunem	TEGUH. G	7	
8	Camat Sale			8
9	Camat Lasem		9	
10	Camat Pancur	[illegible]		10
11	Camat Sedan	[illegible]	11	
12	Camat Sluke	Swoigyo		12
13	Camat Kragan		13	
14	Camat Sarang	Bachmad S		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN

Drs. ACHMAD MU[illegible]
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA HUT RI KE - 68

DAN PENYAMPAIAN PENGANTAR/KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG

APBN TA 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 16 AGUSTUS 2013

PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN			15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB			20
21	B K D			21
22	BKP & P4K			22
23	DINAS PEKERJAAN UMUM			23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINAS PENDIDIKAN			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANHUT			27
28	DINLUTKAN			28
29	DINHUBKOMINFO			29
30	DINAS DUKCAPIL			30
31	DINSOSNAKERTRANS			31
32	DINBUDPARPORA			32
33	DINAS ENERGI & SDM			33
34	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			34

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTINO	KA. KESBANG	35
36	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winarno	Ka Pustasip	36
37	KANTOR PPT	Sri Sugiyarti	Ka KPPT	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Hijoto dr.	Direktur	38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BPD JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	BKK LASEM			46
47	R B S J			47
48	B P N KAB. REMBANG			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Achmad B	Adm	53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KPU KAB. REMBANG			56
57	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	P. Demokrat			62
63	Bakti RSJ REMBANG	SUKIMAN	Ka Bakti	63
64	SAMINGAN MANGGULA	MAGABUDHI	PANDITA	64
65	SMP N 3 REMBANG	SUTIYONO	Kep. Sekolah	65
66	BPMPKB	NGATIHI	SEKRET	66
67	SARJONO	[illegible]		67
68	SUHARNO	BPBD		68
69	[illegible]	[illegible]		69
70	Imam Teguh S.	ESDM		70
71	Agung.	BPBD.		71
72	Kusumo Endro	IRBAN WIL II		72
73	ARJUNASI	IRBAN WIL III		73
74.	MARSONO	BKD.		74
75.	Moch. Hardi SS	MTs. MBR.		75.
76.	[illegible]	[illegible]		

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
74	RUMKY. ADIB KODIM	MUSEH. ADIB	PASI KUM	74
75	Kodim 0720	Khumaidi	Pasiter	75
76	BRI Rembang	Ichsan Aldia	MP	76
77	Drupodo	Bappeda	Sekret	77
78	DEREK METI H	"	KABID	78
79	SUGIHARTO	-"-	-"-	79
80	Edy H. Antoni	-"-	-"-	80
81	Sarma Simbolon	IBI	Bidan	81
82	Winaryu K/Dinpendik		Kabid PNF	82
83	MUNADIN	Dinkes	Kabid PAUD	83
84	SILIK DAMAYANTO	SMA 2 PW		84
85	ABDI BKS	ABDI	Sekbes	85
86	SMPN 6 PW	Bud. Supiyanti	KS	86
87	Kabid Dalmas	Budi Jan	Kabid	87
88				88
89	Sekretaris / Ka TOUR	ISWENTI	Ka TATE	89
90	Fx. Sutiadi /	Undangsih	Sekretaris	90
91	pandapa Ambar	ARIEN. Ir.	Bid. Pariwisata	91
92	Koramil 02 Kabuh	Rasiyono	Danramil	92
93	SUGIYANTO	INDAKOP	KABID	93
94	Mursyono.	Dinkes Lant.	Kabid TPH.	94
95	PRIJONO	LVRI	WKETUA	95
96	Sukamdi	Kopasad		96
97	Koramil 13/Sedan	SOEROJI	Danramil	97
98	DKK	TITIK W.	Kabid Promkes	98
99	DINUTKAN	SAMUDJI	Kabid PPSDK	99
100	Dinkes	Priyo	Sekret	100
101	DISNAKER	Nuharno		101
102	PLN	Puetiyanto	Sek	102
103	FKPPI	Eny Dwi S.		103
104	MAN REMBANG	H. MUKHAMAR	Kasubag	104
105	Dinas PU	Triyono Lut	Sekdis	105
106	BPMPKB	SRI SURYANDARI	Kabid	106
107	ESDM	SOEBIYANTORO	Kabid	107
108	ESDM	Martyasa	Sekdin	108
109	Dinkutkan	Mardanu	Kabid	109
110	RSU	Retno Dwi P, SKM	Kabid	110
111	Kepala Sub Perwakilan	AKP. KISWORO	Ka Perwakilan	111
112	Y.B. SUDJARWADI	KSWD ABB	Kabid TU	112

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
113	Dinhub Komunjo	Amat D	Sekret	113
114	SMA 2 Tlg	Sumarno	Kep Sek	114
115	SMP N 1 Rbg	Sunjitno	Pkmas	115
116	Dinlutkan Rbg	Sudiyono	Sek	116
117	— " —	Sa'roni	Kabid	117
118	Dinhubkominfo Kab Rbg	Joesdiantoro	Kabid.	118
119	Mar Sutiyarno	Kasdim 0720	Kasdim	119
120	Hanyanto	PT. Askes	Ka Opl	120
121	SMK 1 Rembang	SINGGIH Dwiyono	Ka	121
122	SMP 4 Rembang	SUPARTI	Ka	122
123	Dinperindut	Nurhidayati	Sekr	123
124	BCA Cab	SOCECAMTI		124
125	BLH.	Prapto Yo		125
126	BPR BANK PASAR	M. Mukhlasin Dwi		126
127	BPSO	Harjono	Kasi	127
128	~~E. Ruby. D~~	~~Pegawai~~		128
129	Panwaskab Rembang	E. Ruby. D	Komisioner	129
130	BKPP&K	Cahyo	Kabid P	130
131	Sek Dinkesnakertrans	SURIYANTAN	Sek	131
132	~~ARIS~~ DINKES	ARIS. S.	Kabid PZ	132
133	Dinhub Komunjo	SUWARNO	Kabid TKR	133
134	Dinhubkominfo	M. SOFYAN	Kabid LL	134
135	Bid Pengembangan	MUKHLIS M.R	Kabid Bina	135
136	Dinperindut	Agus Iwan H	Kabid Pelayan	136
137	Dinperindut	[illegible]	Kabid PIN	137
138	Inspektorat	Pjohn P.	Sekretaris	138
139	Bag Umum	Ichsrib	Ajud Bupati	139
140	POLRES REMBANG	ANALIS. KAP.	Adc Kapolres	140
141	BKD	Bambang R.	Kabid	141
142	Adc Kasdim	Dwiky Eko S	Adc Dandim	142
143	Adc. Wabup.	—	—	143
144	Kel. Kutoharjo	Purwono	Lurah	144
145	Dinhubkominfo	Sofyan Ch A	Kabid	145
146	RSU R. Soetrasno Rbg	Laksmi I. dr	Kabid	146
147	TP. PKK. KAB	BUDI SETIASIH	Sekrt.	147
148	Kan Kemenag	Subchi	Kepala	148
149	Biro Ortala	[illegible]	AT	149
150	B. Sucipto.	Irfan.		150
151				151

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
152	~~Sutrisno~~ Kodim	Sutrisno	Dan Bawilos	152
153	Sumijan/Kodim	Sumijan	Danramil 06	153
154	BPS	SAICHUDIN	Ka.	154
155	DKK - Nurani H	DKK.	Kabid	155
156	- Kurniati		— " —	156
157	- Titik S Sem.		— " —	157
158	DPUK.	M. Kokhim	Kabid	158
159	KORAMIL II/SALE	TARMUJI	DANRAMIL	159
160	RSUD	Dr. Agung Hidayat	Direktur	160
161	Sma Kartini	Guwayan	Wks Kep	161
162	DPU	ENDRO	Kabid	162
163	BKP dan PPK	Sri Prabandari	Kabid KP	163
164	DEMOKRAT	SOEMARMO	Sekr.	164
165	PDAM	BUSWAKHID H	DIR	165
166	SMP N 5 Rbg	Sri Harini		166
167	BPMP KB Rbg	Rusmujati	Kabid PPPA	167
168	BPBD	Hoeryodi	Kabid	168
169	DPPKAD	Hari Jtw	— " —	169
170	BPMPKB	Penyadi	Kabid KB	170
171	Slamet Haryanto	BPMPKB	Kabid PM	171
172	Sangga Sinombing	PD. A.U. Unit Percetakan	Dir	172
173	SUMARMO	PRAMUKA		173
174	FAHRUDIN	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	174
175	Disbudpar Pora	Sukarti	Kabid Dewan Sca	175

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
191	Sutrisno	Desa Kab. Lor		191
192	Pdp. David Kurnia, Sih.	Gereja Bethel Indonesia	Staff	192
193	Dinbrinet	Prentiya	Kabid hut	193
194	Sutartiki	Dinrtuk Capil	Kabid Capil	194
195	~~Bibit Ag~~	~~Kabid~~		195
196	Gapolsek Sumber	BIBIT Ag	Ka Sumb	196
197	RUTAN KEMBANG	PEGUH	KA KPR	197
198	Bappedi / bunsosbet	Wahyuni	Kabid	198
199	RSUD M. R. SOEGENO	Sri Sapuro	Kabid	199
200	Pagias	Desa Kraga	Sekcar	200
201	BKP & PGK	WURYANTO	SEK.	201
202	Pujo L.	BKP + PGK.	Kabid.	202
203				203
204				204
205				205
206				206
207				207
208				208
209				209
210				210
211				211
212				212
213				213
214				214
215				215
216				216
217				217
218				218
219				219
220				220
221				221
222				222
223				223
224				224
225				225
226				226
227				227
228				228
229				229
230				230

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
231				231
232				232
233				233
234				234
235				235
236				236
237				237
238				238
239				239
240				240
241				241
242				242
243				243
244				244
245				245
246				246
247				247
248				248
249				249
250				250

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

PIDATO KENEGARAAN TANGGAL 16 AGUSTUS 2013

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan *insya Allah* kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.
Kita juga bersyukur, pada pagi ini, dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Masih dalam suasana Hari Raya, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan selaku pribadi, saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga masing-masing dari kita, dapat mengambil hikmah terbaik dari bulan suci Ramadhan tahun ini.
Siang nanti, saya juga akan menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya. Kedua pidato yang saya sampaikan di forum terhormat ini, hakikatnya juga saya tujukan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan, dan semangat kejuangan yang di-wariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerde-kaan. Mereka adalah sumber inspirasi, dan kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemer-dekaan.
Pada hari ini, kita juga perlu merenungkan perjalanan reformasi yang telah berlangsung selama 15 tahun. Proses ini telah dimulai sejak Pemerintahan Presiden Habibie, yang dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan terus berlangsung hingga saat ini. Kita juga telah melewati era transisi demokrasi. Sejumlah tantangan dan ujian telah kita lalui. Banyak yang telah kita capai, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan.Konsolidasi demokrasi semakin kita tingkatkan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan budaya demokrasi.
Alhamdulillah, demokrasi semakin tumbuh dan mekar. Hal ini ditandai, antara lain dengan makin berfungsinya *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara, terlaksananya desentralisasi dan otonomi daerah, terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, damai, *fair* dan demokratis, serta terbangunnya keleng-kapan lembaga negara, yang menjamin kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kita juga semakin memperkuat tegaknya pranata hukum *(rule of law)*. Kita sungguh ingin menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga terus meningkatkan efektivitas penegakkan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita juga semakin menjamin perlindungan serta aksesibilitas bantuan hukum bagi setiap warga, demi terwujudnya keadilan untuk semua. *Justice for all.*
Sungguhpun demikian, kita menyadari bahwa ke depan ini, upaya untuk membuat demokrasi dan pranata hukum berjalan secara lebih baik lagi, masih harus terus kita lanjutkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Sesungguhnya, apa yang telah kita lakukan dewasa ini tidak sebatas reformasi, tetapi sebuah transformasi. Oleh karena itu, perubahan yang kita kelola merupakan sebuah proses yang mendasar, melibatkan peran aktif berbagai aktor penyelenggara Negara, masyarakat, dan termasuk pula komunitas dunia usaha.
Berkaca pada pengalaman di kawasan lain, *alhamdulillah* Indonesia telah mampu melalui proses transisi demokrasi dengan relatif damai. Kita tidak hanya berhasil melewati tahap yang paling kritis, tetapi juga telah mampu menjaga serta terus memperkuat tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Namun demikian, sekali lagi, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang. Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk mema-jukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.
Saya bersama jajaran pemerintah berkomitmen me-nuntaskan sasaran dan capaian RPJMN 2010-2014, dalam sisa waktu menjelang berakhirnya mandat saya selaku Presiden. Saya yakin dan percaya, melalui

kerja keras dan dukungan penuh DPR dan DPD, pemerintah akan dapat menuntaskan agenda pembangunan nasional tersebut.

Sejauh ini, melalui kerja sama tersebut, telah banyak capaian pembangunan yang kita hasilkan. Memang, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu terus diperbaiki. Namun, kita harus optimistis bahwa upaya kita akan berhasil.

Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia telah berhasil kita tingkatkan secara signifikan. Sejumlah indikator memperlihatkan hal itu. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi menunjukkan realisasi yang menggembirakan. Angka Harapan Hidup terus meningkat, bahkan kita optimis akan mampu mencapai sasaran pada 2014. Tingkat kematian bayi dan tingkat kematian ibu melahirkan terus menurun. Bahkan kita menjadi contoh keberhasilan sebuah Negara, yang mampu menurunkan secara signifikan penderita tuberkolosis, baik melalui pendeteksian dini maupun pengobatannya.

Kemampuan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan pendapatan per kapita, sekali-gus menjelaskan semakin membesarnya jumlah kelas menengah di tanah air. Tahun 2004, PDB per kapita kita sebesar 1.177 dolar Amerika. Pada tahun 2009 berhasil kita tingkatkan menjadi 2.299 dolar Amerika. Angka ini terus meningkat, dan mencapai 3.592 dolar Amerika pada tahun lalu. Dengan usaha dan kerja keras kita bersama, *Insya Allah* pada akhir tahun 2014, PDB per kapita kita akan mendekati 5.000 dolar Amerika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Realitas dan situasi global dewasa ini masih diwarnai ketidakpastian, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi. Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara misalnya, proses transisi ke arah demokrasi masih belum menentu.

Dalam situasi dunia seperti ini, dan ketika hubungan internasional semakin kompleks dan dinamis, suatu para-digma baru diperlukan. Indonesia berpandangan sangat-lah penting untuk mengedepankan semangat kebersamaan antar-negara, bagi tercapainya stabilitas bersama, keaman-an bersama, dan kemakmuran bersama. Posisi kita sangat-lah jelas. Indonesia berketetapan untuk senantiasa menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global.

Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia selalu mengajak untuk mewujudkan *"dynamic equlibrium"*; keseimbangan yang dinamis. Suatu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan. Pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan; bukan kompetisi apalagi konfrontasi. Suatu keyakinan bahwa kemajuan sebuah negara bukanlah ancaman bagi negara lain, tetapi justru peluang bagi peningkatan kerja sama dan kemitraan.

Indonesia juga berpandangan, kini sudah tiba saatnya bagi kawasan Asia Pasifik, bahkan Indo-Pasifik, untuk mengupayakan sebuah traktat persahabatan dan kerja sama *(treaty of friendship and cooperation)*. Instrumen ini bertujuan untuk meningkatkan saling percaya; menge-sampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa; serta berlandaskan semangat kebersamaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berkomitmen untuk terus memastikan kesiapan menuju pembentukan Komunitas ASEAN 2015 melalui tiga pilar—pilar politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kita juga aktif melibatkan masyarakat dalam proses ini, agar Komunitas ASEAN dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi kita semua.

Saudara-saudara,

Kita sangat menaruh perhatian pada perkembangan politik dan keamanan di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya di Suriah, Mesir dan Palestina. Berlarutnya instabilitas politik di Timur Tengah juga berdampak pada stabilitas dan keamanan global. Indonesia bersama masya-rakat internasional, aktif mendorong berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini.

Dalam kasus Suriah, Indonesia mendorong para pemimpin negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk lebih berperan aktif, dalam mencari penyelesaian krisis politik dan keamanan di negeri itu. Dunia tidak boleh berpangku tangan, dan membiarkan krisis kemanusian itu terus berlanjut. Untuk menemukan solusi, saya telah berbicara dengan sejumlah tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar bagi penyelesaian konflik Suriah; termasuk Sekjen PBB, Presiden Rusia, Perdana Menteri Turki, dan Presiden Iran. Untuk tujuan yang sama, saya juga telah berkirim surat kepada para kepala negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris dan Perancis.

Terkait perkembangan di Mesir, kita menyampaikan harapan agar krisis politik dapat segera teratasi. Serta proses rekonsiliasi nasional dapat segera dimulai. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir hari-hari terakhir ini. Kita berharap korban jiwa yang terus berjatuhan dapat segera dihentikan. Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi para pengunjuk rasa, tentulah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Saya menyeru agar pihak-pihak yang ber-hadapan bisa saling menahan diri. Peran para pemimpin dan elit politik sangat menentukan. Saya tahu situasi yang dihadapi oleh bangsa Mesir saat ini sangatlah tidak mudah. Tetapi selalu ada jalan keluar, jika semua pihak mau membangun kompromi dan *win-win solution*.

Khusus mengenai Palestina, bersama masyarakat internasional lainnya, kita aktif memperjuangkan diraihnya hak-hak sah bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.

Kita juga terus memperjuangkan peningkatan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan turut mem-bantu peningkatan kapasitas menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berharap bahwa dimulainya kembali perundingan langsung antara Palestina dan Israel, dapat menuju terbentuknya Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel, sesuai dengan visi *two-states solution*.

Indonesia juga terus aktif mendorong penguatan demokrasi, serta pelindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia pada tingkat kawasan dan dunia. Dalam kaitan itu, Indonesia akan kembali menggelar *Bali Democracy Forum, BDF*, yang keenam kalinya, pada bulan November 2013. Selama lima kali penyelenggaraan, BDF telah menjadi forum utama dialog untuk pemajuan demokrasi di Asia Pasifik.

Saudara sekalian yang saya muliakan,
Tahun 2013 merupakan tahun yang sangat penting dan istimewa bagi Indonesia. Setelah hampir 20 tahun, Indonesia kembali menjadi ketua dan tuan rumah perte-muan puncak *Asia-Pacific Economic Cooperation*, APEC, di Bali, pada bulan Oktober mendatang. Tema pertemuan APEC di bawah kepemimpinan Indonesia adalah "*Resilient Asia-Pacific, Engine of Global Growth*". Di penghujung tahun ini juga, kita akan menjadi tuan rumah dua pertemuan penting lainnya: *World Cultural Forum* dan pertemuan tingkat menteri *World Trade Organization—WTO*. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut menyukseskan perhelatan penting ini.
Kontribusi internasional Indonesia juga tercermin melalui peran kita dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia telah menjadi salah satu penyumbang utama sejumlah misi perdamaian PBB. Saya yakin, kita semua sependapat, bahwa Indonesia harus terus berkontribusi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, atas dasar politik luar negeri yang bebas-aktif, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Peran strategis Indonesia juga tercermin dengan ditunjuknya Indonesia oleh Sekjen PBB, untuk memimpin Panel yang bertugas menyusun agenda pembangunan dunia pasca-MDGs. Saya bersama Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris, David Cameron telah menjalankan amanah ini. Dan saya telah menyerahkan laporan akhir dari Panel kepada Sekjen PBB akhir bulan Mei 2013 di New York.
Secara aktif kita juga memperjuangkan terbangunnya kemitraan global, agar dunia dapat bersama-sama mengha-puskan kemiskinan dalam bingkai pembangunan berkesi-nambungan dan berkeadilan—*sustainable growth with equity*.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan empat hal penting yang perlu kita cermati saat ini. *Pertama,* tentang pentingnya kemampuan mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. *Kedua,* tentang pentingnya memelihara kerukunan dan toleransi. *Ketiga,* pentingnya untuk menyukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai. *Keempat*, pentingnya kita terus memperta-hankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Hal penting pertama, terkait dengan kemampuan kita menjaga dan mengelola perekonomian nasional. Bila kita melihat kembali perjalanan ekonomi nasional pasca krisis 1998, *Alhamdulillah* ekonomi kita terus tumbuh secara berkesinambungan. Daya beli masyarakat terus meningkat, kelas menengah tumbuh secara signifikan, stabilitas fiskal dan moneter terjaga, serta fundamental ekonomi nasional semakin kuat. Sejumlah gejolak eksternal, mulai dari lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga krisis finan-sial dan ekonomi global, dapat kita hadapi secara baik. Ekonomi tumbuh dalam kisaran 5-6 persen, dunia usaha berkembang, pengangguran semakin berkurang dan angka kemiskinan dapat terus kita turunkan.
Semua capaian ini terjadi semata karena kita telah berhasil menyatukan tekad untuk menemukan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah, pelaku dunia usaha termasuk para pekerja Indonesia, dan sege-nap pihak atas segala sumbangsihnya.
Saudara-saudara,
Di sejumlah forum internasional, baik yang bersifat regional seperti ASEAN dan APEC, maupun multilateral seperti forum G20, saya sering mendapatkan pertanyaan dari banyak pihak menyangkut resep yang dimiliki Indo-nesia, sehingga kita dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global 2008-2009, dan bahkan ekonomi kita tumbuh secara mengesankan.
Saya menjawab, pengelolaan ekonomi Indonesia selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dengan tetap menjaga ruang ekspansi yang terukur. Di banyak negara yang dilanda krisis keuangan dan ekonomi, sering kedua hal ini dipertentangkan, atau menjadi *trade-off*. Selain itu, Saya juga sampaikan bahwa "pembangunan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh semakin baiknya iklim dunia usaha, terjaganya stabilitas politik dan keamanan serta masifnya gerakan kewirausahaan".
Prinsip kehati-hatian dalam mengelola ekonomi juga tercermin pada komitmen serta kemampuan kita menjaga kesehatan fiskal. Penerimaan negara terus ditingkatkan, belanja terkendali, serta defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto terjaga di bawah 3 persen. Secara lebih rincinya, hal ini akan saya uraikan nanti pada Pidato RAPBN Tahun Anggaran 2014 beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara,
Kita perlu bersyukur, penyesuaian beban subsidi BBM telah kita lakukan. Dalam hal ini, saya ingin kembali menyampaikan penghargaan kepada anggota Dewan yang terhormat dan masyarakat luas atas dukungan yang diberi-kan, sehingga kita dapat mengurangi beban subsidi BBM pada APBN yang berlebihan. Dengan begitu, kita mampu mengalokasikan anggaran lebih besar ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, utamanya mereka yang berpendapatan rendah. Seperti program

perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan sarana transportasi umum, serta program sistem jaminan sosial.
Sementara itu, pemerintah juga terus mendorong penguatan pasar domestik dan daya beli masyarakat melalui apa yang kita sebut *Keep Buying Strategy*. Strategi untuk tetap mempertahankan dan meningkatan 'keterjang-kauan konsumsi' baik dari sisi harga maupun pendapatan masyarakat. Kebijakan yang kita telah tempuh sejak 2004 ini, terbukti mampu memantapkan kapasitas pasar domes-tik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Sejak tahun 2011, melalui Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita telah berketetapan untuk mengakselerasi pemba-ngunan infrastruktur dan konektifitas. Hasilnya mulai ter-lihat. Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air. Hal ini terwujud karena kolaborasi yang baik di antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, pelaku usaha dan masyarakat.
Tujuan dari semua itu adalah terbangunnya konektivi-tas nasional, yang pada gilirannya akan mendorong indus-trialisasi dan hilirisasi. Ekonomi kita juga akan semakin efisien, semakin berdaya saing, dan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
Semua resep itu, terbukti telah mampu menjadikan Indonesia salah satu negara tujuan utama investasi dunia, dengan menyandang predikat *investment-grade*. Hal yang juga menggembirakan adalah arus investasi di luar Pulau Jawa terus meningkat. Ini akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang lebih merata, dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas.

Saudara-saudara,
Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengede-pankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan ling-kungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan lapang-an kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program Pro-Rakyat.
Saat ini, Indonesia merupakan Negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,37 persen pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86 persen, pada 2004 menjadi 5,92 persen pada Februari 2013. Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin, dan menurunnya tingkat pengangguran di Indo-nesia, merupakan bukti penting keberhasilan pem-bangunan nasional yang kita lakukan bersama.
Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan. Seperti saudara-saudara ketahui, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan kebijakan utama pemerintah. Komitmen ini ditunjukkan melalui serangkai-an program Pro Rakyat, yang dijabarkan ke dalam sejum-lah program perlindungan sosial seperti; Bantuan Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dan Bantuan untuk Lanjut Usia dan Cacat.
Selain itu, program PNPM juga secara nyata telah berhasil membantu pembangunan sarana dan fasilitas dasar di daerah pedesaan. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kita jalankan sejak 2007 juga telah memperluas permodalan usaha mikro dan kecil. Tidak kalah penting dari itu semua, kita juga mengintensifkan program Air Bersih, Perumahan Sangat Murah dan Murah, Penyediaan Transportasi Murah, serta bantuan untuk komunitas nelayan dan kaum miskin perkotaan.Pengalaman menun-jukkan apapun situasi yang kita hadapi, dan terlebih ketika negara kita ikut terdampak dari krisis dunia, program-program pro-rakyat ini harus kita lak-sanakan dan bahkan kita tingkatkan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tengah kita lakukan saat ini menghadapi tantangan baru, yaitu situasi ekonomi dunia yang kurang menggembirakan. Menghadapi situasi seperti ini, kita membutuhkan kesiapan mental dan kebijakan yang tepat, sebagai langkah antisi-patif maupun *respons* terhadap ketidakpastian global. Kita akan selalu pastikan kebijakan ekonomi yang kita tempuh tepat, terukur dan menjawab tantangan. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini, akan saya sampaikan dalam pidato siang hari nanti.
Satu hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya menarik pengalaman berharga dari pengelolaan ekonomi di saat krisis. Koordinasi yang baik antara otoritas fiskal, otoritas moneter dan sektor riil sangatlah penting dalam menghadapi setiap gejolak ekonomi global. Sungguh beruntung bahwa saat ini kita telah memiliki Forum Stabilitas Sistem Keuangan, FSSK, yang awalnya beranggotakan Pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Ketika krisis*subprime mortgage* terjadi pada 2008, Forum ini mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya percaya dengan bergabungnya Otoritas Jasa Keuangan, OJK, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi setiap gejolak perekonomian dunia.
Penguatan ekonomi domestik juga dilakukan melalui kebijakan untuk terus mendorong berkembangnya inovasi, pemanfaatan teknologi, insentif produksi barang setengah jadi (*intermediate goods*), serta upaya terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ruang fiskal terus kita perbaiki

melalui peningkatan alokasi anggaran terhadap sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan.
Tidak kalah penting dari itu, pemerintah juga terus memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, pengelolaan impor, serta perbaikan iklim investasi melalui sejumlah kebijakan fiskal. Optima-lisasi penyerapan anggaran juga terus dilakukan.
Melalui hal ini, serta dukungan dan kerja sama semua pihak, kita optimistis kesiapan menghadapi setiap gejolak eksternal menjadi lebih baik lagi, sebagaimana keberha-silan kita melewati krisis ekonomi dunia pada tahun 2008-2009 yang lalu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hal penting kedua yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana kita perlu terus menjaga tole-ransi, serta mengelola kerukunan antar dan intra umat beragama di Indonesia. Saya mengajak kita semua untuk semakin menyadari bahwa Bangsa Indonesia adalah bang-sa yang majemuk. Kita harus memaknai kemajemukan ini sebagai anugerah, sekaligus kewajiban untuk menge-lolanya secara bijak. Dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, kita perlu terusmemperkuat toleransi. Kita harus terus mencegah terjadinya benturan dan kekerasan komunal, yang akan mengganggu ketenteraman hidup masyarakat dan kesatuan bangsa kita.
Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara menjamin sepenuhnya keberadaan individu atau kelompok minoritas. Dalam landasan kebangsaan yang kita anut, kita tidak membeda-bedakan orang atau kelompok berdasarkan latar belakang agama, sosial dan budaya serta perbedaan identitas lainnya. Seluruh warga negara, apa pun latar belakang sosial dan budayanya, memiliki harkat dan kehormatan yang sama. Dalam perspektif berbangsa, tugas kita adalah merawat dan menjaga kemajemukan itu, seraya memperkuat persatuan nasional.
Berdasarkan konstitusi, negara juga menjamin kebe-basan beribadah bagi setiap warganya menurut agama dan kepercayaannya. Hendaknya semua orang menghormati aturan konstitusi itu. Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa seseorang atau sebuah kelompok memaksakan keyakinan-nya kepada mereka yang lain, apalagi disertai dengan ancaman, intimidasi, dan tindakan kekerasan.

Saudara-saudara,
Semua yang saya sebutkan tadi merupakan prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita perjuangkan. Kita harus memberikan perhatian yang penuh agar toleransi tumbuh makin subur di antara segenap warga negara. Semangat untuk menghormati perbedaan juga perlu terus didorong untuk menumbuhkan kesediaan saling bekerja sama dan saling percaya, di antara kelompok-kelompok yang berbeda.
Secara umum, hubungan antar-kelompok dan golong-an dalam masyarakat kita yang majemuk, sesungguhnya masih terjaga. Walaupun begitu, saya sungguh prihatin dengan masih terjadinya sejumlah insiden intoleransi dan konflik komunal, yang di antaranya bahkan disertai dengan kekerasan. Sebenarnya, itu semua dapat dicegah apabila kita senantiasa mengedepankan dialog. Juga apabila se-mua pemimpin dan tokoh di seluruh Indonesia, apakah pemerintahan, agama, sosial dan budaya, peduli dan mengambil tanggung jawab bersama.
Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, karena perbedaan itu sendiri merupakan ciri dari masyarakat maje-muk. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah perbedaan itu menjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, saya mengajak para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta orang tua dan para guru, untuk terus menye-maikan nilai-nilai toleransi, dan prinsip hidup berdampingan secara damai.
Ketika gelombang radikalisme dan ekstrimisme terjadi di banyak belahan dunia, Indonesia harus tetap mampu mengelola kemajemukan kita. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas.
Saya juga meminta agar insan pers dan media massa ikut memupuk modal sosial, agar tumbuh menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat majemuk kita.
Tidak kalah pentingnya dengan itu semua, saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan dialog. Hindari benturan dan tindak kekerasan. Hendaknya setiap orang dan kelompok bisa menahan diri dari amarah dan amok, kesewenang-wenangan dan pengabaian pada hukum, undang-undang dan konstitusi kita.
Di atas semua itu, marilah kita tumbuhkan solidaritas sosial, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Mari kita ciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Itulah gambaran yang saya percaya, merupakan sendi-sendi paling penting dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kuat dan bersatu.

Saudara-saudara,
Kita bersyukur bahwa masyarakat internasional sangat menghargai kepeloporan serta kepemimpinan Indonesia dalam ikut memperjuangkan nilai-nilai toleransi serta kemajemukan, melalui dialog antar-keyakinan dan peradab-an di tingkat dunia.
Diplomasi Indonesia di tingkat internasional, terus dilakukan secara aktif untuk ikut memperjuangkan toleransi dan kemajemukan. Secara bilateral, saat ini Indonesia memiliki berbagai forum dialog antar-keyakinan, tidak kurang dengan 22 negara. Sejak tahun 2004, Indonesia juga menjadi pemrakarsa

berbagai forum dialog serupa, baik di kawasan Asia dan Pasifik, maupun antar-kawasan dalam kerangka *Asia Europe Meeting*, ASEM.
Di forum multilateral, Indonesia juga menjadi salah satu motor bagi terbentuknya "Aliansi Peradaban" di PBB. Bahkan, tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional tersebut yang melibatkan berbagai unsur penting masyarakat dunia.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hal penting ketiga adalah terkait dengan penyelengga-raan dan persiapan Pemilu 2014, serta suksesi kepemim-pinan nasional. Tahun depan, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten atau kota dan DPD RI. Setelah itu, kita juga akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu tahun depan merupakan pemilu keempat di era reformasi, yang akan diikuti oleh 12 Partai Politik Nasional dan tiga Partai Politik Lokal di Aceh. Pemilu juga akan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, 2.137 anggota DPRD Provinsi, dan 20.257 anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Dari segi pembiayaan, penyelenggaraan kedua pemilu ini juga tidak tergolong sedikit. Pemerintah mengang-garkan tidak kurang dari Rp17 triliun. Belum lagi biaya yang akan disediakan oleh para peserta Pemilu. Sungguh ini sebuah perhelatan demokrasi yang sangat akbar, tidak saja bagi negeri ini, namun juga dalam bandingannya dengan pemilu di negara-negara demokrasi lainnya.
Kita semua berharap dan perlu memastikan bahwa pemilihan umum di tahun 2014, akan berlangsung secara lancar, tertib, dan damai. Tidak kalah penting dengan itu, kita juga berharap agar penyelenggaraan pemilu nanti memenuhi semua standar yang berlaku secara universal, yang dalam tradisi demokrasi haruslah bersifat bebas dan adil; *free and fair*. Apa yang sudah kita capai dalam tiga pemilu demo-kratis sebelumnya, perlu kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan.
Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kita semua berharap agar semua pihak yang terkait dalam penye-lenggaraan pemilihan umum 2014, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. KPU, Bawaslu, baik yang bertugas di tingkat nasional maupun di daerah, serta DKPP, memikul tanggung jawab penuh bagi tersele-nggaranya pemilihan yang demokratis. Hendaknya ketiga lembaga tersebut dapat bekerja sama dan memenuhi segala tugas mereka, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
Kita juga berharap agar partai-partai politik peserta pemilu menjadikan Pemilu 2014, sebagai kesempatan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini. Meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air merupa-kan agenda kita bersama. Untuk itu, partai politik hendak-nya membangun hubungan yang lebih akuntabel dengan para konstituennya. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Setiap wakil rakyat hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan para pemilihnya, dan menjadi-kan amanah tersebut sebagai perjanjian luhur dengan rakyat yang diwakilinya.

Saudara-saudara,
Di tahun 2014, kita juga akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seperti telah kita ketahui, Pilpres kali ini tidak diikuti oleh *incumbent*. Sampai saat ini, setidaknya terdapat puluhan nama yang beredar di media masa. Wajah-wajah baru juga muncul, ikut meramaikan bursa bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Semua wajah menyiratkan hasrat yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sungguh ini sebuah anugerah, karena negeri ini telah berhasil mendorong munculnya para calon pemimpin baru yang berkualitas dan siap melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita berharap, setiap terjadi pergantian kepe-mimpinan nasional, terdapat angin segar yang membawa dua hal sekaligus: pembaharuan dan kesinambungan, *change and continuity*.
Mari kita pastikan bahwa setiap calon mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, mengambil sebuah tanggung jawab besar untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Mari kita pastikan juga, agar para calon secara aktif menje-laskan visi dan misi mereka, serta solusi yang mereka tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang kompleks. Mari kita pastikan bahwa rakyat memiliki informasi yang cukup, untuk menilai para calon pemimpin mereka. Dan akhirnya, mari kita pastikan bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan itu, berlangsung secara tertib dan transparan.
Biarkan rakyat yang memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka, yang diyakini dapat melanjut-kan pembangunan bangsa di masa depan. Pada akhirnya, kita harus menghormati pilihan mereka. Dalam demokrasi, rakyatlah yang menentukan, bukan sekelompok kalangan, baik itu pihak-pihak yang berkuasa, maupun para pengamat dan insan pers. Marilah kita bertekad untuk memperlakukan setiap suara yang diberikan rakyat, sebagai sebuah dukungan sekaligus sumber kekuatan, — menjaga integritas moral dan semangat yang kuat, untuk berbuat yang terbaik untuk negeri ini — bagi siapapun yang terpilih nanti.

Saudara-saudara,
Politik memang dapat mengambil wajah yang keras. Namun, nilai-nilai dan etika demokrasi mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan. Dalam bingkai demo-krasi, kita harus memastikan bahwa para elite politik memiliki komitmen untuk berkompetisi secara sehat dan sportif, serta pada saat yang sama bersedia pula untuk membangun konsensus, demi kepentingan yang lebih besar yakni sebuah kebaikan bersama.

Mereka yang terpilih di pemilu legislatif, dan mereka yang terpilih dalam Pemilihan Presiden, sama-sama terikat oleh tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partai, kelompok, atau golongannya. Yang terpilih memiliki kewajiban untuk juga memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk mereka yang tidak memberikan suaranya kepada diri atau partainya. Itulah indahnya demokrasi.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Hal penting keempat yang akan saya sampaikan, ter-kait dengan kewajiban Negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Apa yang akan saya sampaikan ini tentulah bersifat fundamental dan tidak bisa ditawar-tawar. Di depan sidang yang mulia ini, kita menyatakan tekad untuk dengan segala upaya, memper-tahankan kedaulatan dan keutuhan setiap jengkal wilayah, yang secara sah merupakan bagian integral dan NKRI.

Atas dasar tekad itu pula, kita akan bertindak tegas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, konflik Aceh telah berhasil kita akhiri secara damai. Kini saatnya, segenap elemen masyarakat di Aceh membangun masa depan yang lebih sejahtera, aman dan damai. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghindari segala hal yang berpotensi menciptakan kemunduran, dan kembali ke situasi tidak aman seperti yang kita alami pada masa lalu. Semua pihak, termasuk kalangan yang ada di Aceh, dengan sepenuh hati saya harapkan sungguh memegang teguh semangat dan ketulusan hati untuk mengubur konflik di masa lalu, dan kemudian melangkah ke depan untuk membangun diri, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula di Papua, kita terus mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan di Provinsi itu. Penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Asasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memperluas pembangunan di Papua. Saat ini, berbagai program pembangunan infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di berbagai wilayah Papua. Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua.

Saudara-saudara,

Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun di luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia.

Selama ini, kita senantiasa menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain, negara-negara sahabat Indonesia Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang sama juga diterapkan secara resiprokal. Melalui penegasan ini saya berharap, agar semua pihak bekerja secara aktif untuk mencegah aktivitas politik yang dapat mengakibatkan terganggunya hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Jangan lukai perasaan bangsa Indonesia, karena kami juga tidak ingin melukasi bangsa lain.

Saudara-saudara,

Itulah empat isu penting dan strategis yang perlu saya sam-paikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu : pengelolaan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global; peme-liharaan kerukunan dan toleransi; penyuksesan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan; serta pentingnya kita terus mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Tentu saja di luar keempat isu itu, negara dan pemerintah akan terus melanjutkan apa yang menjadi prioritas dan agenda utama, contohnya di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme dan berbagai kejahatan trans-nasional, serta upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan.

Kita terus melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi terciptanya 'Indonesia Yang Makin Bersih'. Saya terus mendorong institusi penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pence-gahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa tebang pilih.

Kita juga terus mengoptimalkan langkah-langkah pena-nganan terhadap ancaman dan aksi-aksi terorisme. Selain itu upaya konsisten terus kita lakukan dalam menangani kejahatan transnasional, termasuk pemberantasan penya-lahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan berbagai agenda global terkait dengan ancaman krisis pangan, energi, dan air bersih, serta mitigasi dampak dari perubahan iklim.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Menutup Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak kita semua untuk juga semakin berorientasi kepada Indonesia Masa Depan. Tahun ini, genap 68 tahun kita merdeka. 32 tahun mendatang, pada 2045, kita akan genap 100 tahun merdeka. Untuk itu, mari teguhkan tekad dan langkah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Maju, yang lebih mandiri, adil, dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian cita-cita ini, kita perlu terus meningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda Indonesia harus kita bina dan kembangkan menjadi generasi yang cerdas, bermental tangguh dan toleran. Kaum perempuan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, juga perlu kita berikan peluang lebih besar untuk berkarya dan berkon-tribusi dalam pembangunan bangsa. Di samping itu, kita juga terus menumbuhkan budaya inovasi, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang inovatif dan kompetitif. Tentu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai tujuan ini. Diperlukan dukungan penuh dan sinergisitas dari segenap lapisan masyarakat—baik masyarakat sipil, masyarakat politik, maupun masyarakat ekonomi.

Saya mengajak segenap warga bangsa di seluruh tanah air untuk lebih menggelorakan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus bergerak menuju negara maju.

Para pendiri republik telah mewariskan 4 konsensus dasar, atau empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika.* Mari kita jadikan keempat pilar ini menjadi sumber energi dan inspirasi untuk menyukseskan pembangunan bangsa di masa kini dan masa depan.

Kepada jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat Indo-nesia di manapun berada, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas peran serta saudara-saudara dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional selama ini.

Kepada saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air yang mengabdi di berbagai pelosok Nusantara—di pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan daerah terpencil nun jauh di sana—Negara sungguh berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi saudara-saudara. Saya bergembira, sebagian dari saudara-saudara, hadir di antara kita pada hari ini. Saudara yang ada di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya. Saya bangga atas prestasi dan keteladanan saudara semua.

Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Para Presiden dan Wakil Presiden pendahulu saya. Mereka adalah putera-puteri terbaik bang-sa. Jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan ne-geri yang kita cintai ini.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun bangsa dan negara kita, menuju Indonesia yang lebih maju, lebih adil, lebih sejah-tera, dan lebih bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA PENYAMPAIAN KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) TAHUN ANGGARAN 2014 BESERTA NOTA KEUANGANNYA DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 16 Agustus 2013

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Mengawali pidato ini, saya mengajak saudara semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini.

Setelah tadi pagi, saya menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, siang ini, saya lanjutkan dengan pidato penyampaian Keterangan Pemerintah, atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuang-annya.

Ada nuansa yang berbeda pada sidang kali ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2014 merupakan momentum terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Itulah sebabnya, berbagai rencana strategis dan kebijakan umum dalam RAPBN tahun 2014, secara tidak langsung mencerminkan kelanjutan dan hasil-hasil pembangunan nasional, dalam empat tahun terakhir.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Seperti yang telah saya sampaikan dalam Pidato Kenegaraan tadi pagi, tahun 2004, ketika mengawali masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu pertama, saya bertekad untuk melanjutkan agenda reformasi kita, beserta segenap komponen bangsa. Hasilnya telah kita lihat dalam sembilan tahun terakhir ini. Walau di tengah berbagai tekanan persoalan, baik yang terjadi di luar kuasa kita --seperti gejolak ekonomi dunia, dan bencana alam-- maupun permasalahan internal --seperti konsolidasi demo-krasi -- pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2004-2009 mencapai rata-rata sekitar 5,5 persen. Capaian yang patut kita syukuri, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan negara maju pada kurun waktu yang sama.

Tanpa kenal lelah dan putus asa, kita terus melaksanakan pembangunan ekonomi. *Alhamdulillah*, dalam empat tahun terakhir ini, telah banyak hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh tanah air. Kita mencatat bahwa dalam periode 2009-2013 (sampai dengan Juni 2013) kita berhasil memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,9% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun sebelumnya. Inilah pertumbuhan ekonomi tertinggi, setelah kita mengalami krisis ekonomi lima belas tahun lalu. Pada tahun 2004, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar US$ 645 miliar (dalam ukuran PPP), saat ini telah mencapai lebih dari US$ 1,1 triliun (PPP). Dalam hal pendapatan per kapita, tahun 2004 PDB per kapita kita adalah US$1.177, angka ini terus meningkat menjadi US$2.299 ditahun 2009, dan mencapai US$ 3.592 pada tahun 2012. Bila kita terus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi kita, maka *insya* Allah pada akhir tahun 2014, PDB per kapita akan mendekati US$ 5000.

Tak hanya itu, bahkan dalam tahun 2012 dan 2013, di antara negara anggota G-20, Indonesia menjadi negara dengan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi yang membaik, juga diikuti oleh menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret ditahun 2013. Demikan juga tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. Tentu, kemajuan ini belum sempurna, dan masih bisa kita tingkatkan lagi.

Saudara-saudara,
Sebagaimana kita ketahui bersama, ekonomi global dalam dua tahun terakhir ini tidak terlalu bersahabat. IMF memperkirakan, laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2013 tetap pada tingkat 3,1 persen, sementara Bank Dunia memperkirakan 2,2 persen, sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012.

Kondisi ekonomi global ini telah membawa dampak pada perekonomian kita. Kinerja ekspor kita mengalami penurunan. Sementara itu, kebutuhan impor, termasuk bahan bakar minyak terus meningkat. Akibatnya neraca perdagangan kita memburuk, dan kondisi neraca pembayaran kita melemah.

Kinerja APBN juga mengalami tekanan, baik dari sisi pendapatan negara maupun dari sisi belanja negara. Tanpa langkah-langkah khusus, kondisi ekonomi makro kita berpotensi memburuk. Menghadapi perkembangan situasi itu, pemerintah menempuh kebijakan percepatan perubahan APBN tahun 2013. Tujuannya adalah untuk menjaga defisit APBN dalam batas aman melalui pengendalian subsidi bahan bakar minyak, dan mengalihkannya untuk program penanggulanggan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu pemerintah juga melakukan penajaman dan penghematan belanja.

Pada sidang yang terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Dewan yang telah bekerja keras bersama Pemerintah, dalam menyelesaikan Undang-Undang APBN-P tahun 2013, dalam waktu yang relatif cepat.

Tahun 2013 memang bukan tahun yang mudah. Namun pemerintah terus bekerja keras untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk mendongkrak kinerja ekspor, terus kita lakukan dengan menjangkau pasar-pasar baru. Koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter, makin kita tingkatkan. Kecukupan suplai dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat, kita amankan untuk menjaga inflasi. Di bidang kebijakan fiskal, sesuai APBN-P tahun 2013, belanja infrastruktur kita tingkatkan. Dan untuk menjaga daya beli serta tingkat kesejahteraan masyarakat--- khususnya masyarakat miskin--- belanja-belanja sosial dan berbagai subsidi langsung, juga kita tingkatkan.

Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik, pemerintah juga melakukan langkah "*Keep Buying Strategy*". Artinya, ekonomi akan tetap tumbuh dan sektor riil akan tetap bergerak, jika rakyat tetap bisa membeli barang dan jasa yang diperlukan. Jika ada krisis dan tekanan terhadap daya beli, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan dan tindakan yang diperlukan, termasuk bekerja sama dengan dunia usaha. Strategi ini hakikat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat, terutama di kala krisis. Strategi inilah, salah satu yang membantu menyelamatkan kita dalam krisis keuangan global tahun 2008. Saat ini pemerintah sedang merumuskan *Keep Buying Strategy* dengan penyiapan paket stimulus, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Selain itu upaya ekstra juga dilakukan untuk mengendalikan inflasi, agar daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Saudara-saudara,
Di tahun 2014, memang kondisi ekonomi global diperkirakan akan sedikit lebih baik. Namun demikian, di tengah nuansa positif ini, sejumlah ketidakpastian muncul. Misalnya, rencana Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengurangi ekspansi moneternya, atau *tappering off quantitative easing policy*. Akibatnya, terjadi gejolak nilai tukar dan pasar keuangan di *emerging markets*, termasuk Indonesia. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami gejolak ini. Bahkan sebenarnya pelemahan terhadap mata uang rupiah relatif lebih ringan, dibanding pelemahan mata uang negara-negara seperti India, Australia, Malaysia,

Filipina, Korea dan Jepang dalam periode Januari sampai akhir Juli 2013.

Dengan perkembangan yang kurang menggembirakan ini, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4 persen menjadi 3.8 persen di tahun 2014. Meskipun demikian, ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan tahun 2013 sebesar 3,1 persen.

Diluar gejolak di pasar keuangan global diatas, kita juga dihadapkan pada resiko gejolak harga minyak dunia dan komoditas, yang berdampak luas pada ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Gejolak perekonomian global dan harga-harga komoditas mengingatkan kita tentang perlunya mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi kita. Indonesia tak bisa lagi hanya mengandalkan sumber daya alam dan buruh tak terampil. Sejarah menunjukkan bahwa ada sejumlah negara yang masuk ke dalam pendapatan menengah, tetapi gagal menjadi negara industri, karena terus bergantung kepada sumber daya alam atau buruh tak terampil. Negara-negara tersebut masuk ke dalam perangkap jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*). Kita tak boleh terperangkap. Karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mendorong inovasi, serta pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memulai langkah itu dengan kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) impor untuk buku nonfiksi, bagi kemajuan pendidikan dalam negeri. Disamping itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Ini adalah langkah-langkah awal yang penting. Tujuannya: agar sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa depan tak hanya bergantung kepada sumber daya alam dan buruh tak terampil.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Langkah-langkah positif yang diambil melalui percepatan perubahan APBN tahun 2013 tak sia-sia. Langkah ini telah membuahkan hasil, yaitu tersedianya ruang fiskal yang lebih baik dalam RAPBN tahun 2014. Ruang fiskal ini kemudian dialokasikan kepada sektor-sektor infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi publik dan energi terbarukan. Dengan kualitas belanja yang lebih produktif ini, maka peran RAPBN tahun 2014 sebagai salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan, menjadi lebih optimal. Dengan postur RAPBN tahun 2014 seperti ini, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik, untuk menghadapi tekanan-tekanan yang mungkin muncul.

Tentu kita menyadari, bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2014 tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah. Kita tahu anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu, pemerintah juga akan mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek investasi yang sedang berjalan, dan terus memperbaiki iklim investasi di tanah air.

Dalam tahun 2014, neraca perdagangan kita juga diharapkan akan membaik, karena membaiknya permintaan akan komoditas ekspor kita. Pemerintah juga makin mendorong pembangunan industri dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kita pada impor barang modal dan bahan baku. Untuk itu pemerintah sedang mempersiapkan skema pemberian insentif, agar dalam jangka menengah Indonesia dapat menghasilkan bahan baku setengah jadi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berkeyakinan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 akan dapat kembali di tingkatkan.

Aspek lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah ditahun 2014, adalah kesiapan ekonomi domestik dalam menyongsong ASEAN Economic Community 2015, dimana Indonesia harus meningkatkan daya saing dan siap untuk memasuki era baru itu.

Dengan memperhatikan kondisi eksternal dan, perkembangan ekonomi domestik tersebut, serta sasaran RPJMN 2010-2014, pemerintah menyusun RAPBN tahun 2014 dengan hati-hati. RAPBN 2014 pemerintah susun diatas asumsi dasar makro sebagai berikut:

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan mencapai 6,4 persen.

Kedua, asumsi mengenai inflasi. Dengan melaksanakan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, disertai upaya untuk tetap menjamin kelancaran dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, serta kebijakan ketahanan pangan, laju inflasi pada tahun 2014 akan dijaga pada kisaran 4,5 persen.

Ketiga, asumsi nilai tukar rupiah. Melalui kebijakan moneter yang berhati-hati, kita menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas tingkat nilai tukar rupiah yang realistis. Untuk tahun 2014, kita menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar adalah Rp9.750 per dolar AS.

Keempat, asumsi suku bunga. Pemerintah akan terus menjaga kesehatan fundamental ekonomi dan fiskal, agar instrumen Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor. Terkait dengan hal itu, asumsi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, disusun pada tingkat 5,5 persen.

Kelima, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP). Setelah mempertimbangkan berbagai faktor utama, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia sebesar US$106 per barel.

Keenam, asumsi *lifting* minyak mentah dan *lifting* gas bumi. Beberapa tahun terakhir ini, kapasitas produksi kedua sumber daya alam itu menunjukkan penurunan, terutama disebabkan faktor usia sumber yang semakin kurang produktif. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya. Dalam tahun 2014, Pemerintah memperkirakan *lifting* minyak mentah mencapai 870 ribu barel per hari, sementara *lifting* gas bumi mencapai 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Seperti telah saya singgung sebelumnya, RAPBN Tahun 2014 sebagai instrumen kebijakan fiskal akan kita arahkan secara maksimal untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMN 2010–2014. Seperti kita ketahui, visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, adalah mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih demokratis, dan lebih berkeadilan. Upaya-upaya ke arah itu kita lakukan melalui pelaksanaan empat strategi utama, yaitu pembangunan yang pro-pertumbuhan; pro-lapangan pekerjaan (pekerjaan); pro-pengurangan kemiskinan; serta ramah lingkungan.

Kebijakan pembangunan dalam tahun 2014, telah dijabarkan secara rinci dalam RKP tahun 2014, yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2014 ini. Seperti yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat, tema RKP tahun 2014 adalah: "Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan".

RKP tahun 2014 yang kita susun, juga tetap sejalan dengan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yang bertujuan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh tanah air. Tak hanya meningkat, pertumbuhan ekonomi juga harus inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, juga telah ditetapkan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012–2025, yang merupakan upaya komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan di negeri kita.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2014 meliputi tiga bidang utama, yaitu kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakan pembiayaan.

Kebijakan pendapatan negara terutama akan kita arahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pendapatan negara itu, meliputi langkah-langkah antara lain: penyempurnaan peraturan perpajakan, untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar; penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tak terlalu banyak digali potensinya; penyempurnaan kebijakan insentif perpajakan, untuk mendukung iklim usaha dan investasi; dan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak.

Kebijakan pendapatan negara, juga meliputi langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber non pajak. Langkah-langkah itu mencakup optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu pemerintah juga melalukan upaya optimalisasi penarikan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja modal BUMN; serta optimalisasi pengelolaan dan pengawasan PNBP Kementerian Negara dan Lembaga.

Dalam RAPBN tahun 2014 pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.662,5 triliun. Jumlah ini naik 10,7 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2013 yang sebesar Rp1.502,0 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp1.816,7 triliun, naik 5,2 persen dari pagu belanja negara pada APBNP Tahun 2013 yang sebesar Rp1.726,2 triliun.

Dari anggaran pendapatan negara Rp1.662,5 triliun, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.310,2 triliun, naik 14,1 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2013 sebesar Rp1.148,4 triliun. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau *tax ratio* mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. Sedangkan *tax ratio* dalam arti luas, yang mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam telah mencapai 15,5 persen.

Dari sisi belanja, dalam RAPBN tahun 2014 ini pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara secara menyeluruh. Untuk itu, Pemerintah menggariskan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, mempertajam alokasi belanja untuk mendukung pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Tak hanya itu, alokasi belanja juga diarahkan agar mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kedua, melakukan penghematan terhadap kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, seperti biaya perjalanan dinas, kegiatan rapat kerja, *workshop*, seminar, dan kegiatan yang sejenis.

Ketiga, menyempurnakan kebijakan subsidi, di antaranya dengan mengubah secara bertahap sistem subsidi, dari subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Keempat, memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan melalui penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia. Tentu semua itu juga harus didukung dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Kelima, menerapkan sistem *reward* dan *punishment* dalam pengalokasian anggaran. Bagi Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah yang dapat mengelola anggaran dengan baik, akan diberikan tambahan alokasi anggaran. Sebaliknya, alokasi anggaran akan dipotong untuk Kementerian dan Lembaga serta daerah yang tak mampu mencapai sasaran. Saya menyadari bahwa salah satu kendala di dalam kebijakan belanja negara adalah proses pencairan dan penyerapan. Untuk mengatasi hal itu, maka telah dibuat langkah untuk penyederhanaan prosedur dan persiapan yang lebih matang dalam perencanaan anggaran. Dengan langkah ini proses penyerapan anggaran dapat dilakukan lebih dini. Tentu hal ini dilakukan, tanpa mengorbankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hadirin yang saya muliakan,
Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran strategis yang telah kita tentukan, dan berpedoman pada kriteria-kriteria penganggaran tadi, dalam RAPBN Tahun 2014 terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 30 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83,4 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun; Kementerian Agama Rp 49,6 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 41,5 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

Selanjutnya, marilah kita melihat rancangan anggaran belanja ini secara lebih rinci. Dalam RAPBN Tahun 2014*Alhamdulillah*, kita tetap dapat memenuhi amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun, alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan. Dalam tahun 2013 anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,3 triliun dan tahun 2014 mendatang kita rencanakan sebesar Rp 371,2 triliun, atau naik 7,5 persen.

Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, kita arahkan untuk meningkatkan mutu, akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Tujuannya, untuk mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan bonus demografi dan momentum 100 tahun Indonesia merdeka.

Untuk itu, mulai tahun pelajaran 2013/2014 wajib belajar 9 tahun (jenjang pendidikan dasar), ditingkatkan ke jenjang pendidikan menengah, melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Hal ini dimaksudkan, agar anak-anak Indonesia pada usia 16-18 tahun pada tahun 2020 nanti minimal 97 persen berpendidikan menengah. Apabila tanpa program PMU, angka tersebut baru dicapai pada tahun 2040.

Satu masalah penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus kita bersama, adalah distribusi guru antar satuan pendidikan dan antar wilayah yang belum merata. Daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, masih ada yang belum terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan akan terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kualitas guru termasuk di dalamnya sertifikasi guru dan implementasi kurikulum 2013. Beberapa program afirmasi akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan seperti pengiriman guru, pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T), pengiriman pelajar asal Papua untuk melanjutkan studinya di beberapa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi Negeri terbaik di luar Papua.

Infrastruktur sekolah juga terus kita bangun. Anggaran akan kita sediakan untuk melanjutkan penuntasan rehabilitasi ruang kelas rusak, serta pembangunan sekolah baru, Akademi Komunitas dan sarana pendukungnya. Dan untuk makin memeratakan akses pendidikan, dalam tahun 2014 kita tingkatkan lagi penyediaan bantuan siswa miskin dan beasiswa Bidik Misi.

Alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan kita prioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Pemerintah merencanakan untuk membangun Puskesmas perawatan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan yang berpenduduk. Selain, itu juga diberikan bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.536 puskesmas. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan ibu bersalin, yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin, hingga mencapai 100 persen. Dengan berbagai program dan kegiatan itu, kita upayakan derajat kesehatan masyarakat makin meningkat di seluruh pelosok tanah air.

Di bidang pertahanan, kita alokasikan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Tujuannya, agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum (*Minimum Essential Forces/MEF*), dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat kita capai. Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional. Upaya ini dilakukan dengan memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri. Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun. Generasi dan teknologi persenjataan kita juga tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita.

Tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, prioritas alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga kita prioritaskan. Alokasi ini kita tujukan untuk peningkatan rasa aman dan

ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri. Anggaran juga kita sediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok. Selain itu, kita juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014. Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen. Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi.

Saudara-saudara,
Kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masih jauh dari sempurna. Ini sering kita rasakan menjadi penghambat berbagai peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial di tanah air. Untuk mengatasi itu, sejumlah proyek infrastruktur berskala besar sedang dikerjakan di berbagai wilayah tanah air, termasuk perluasan beberapa bandara dan pelabuhan berikut fasilitas pendukungnya. Juga jalan tol dan ruas rel ganda.

Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Dalam tahun 2014, alokasi anggaran bagi Kementerian Pekerjaan Umum kita prioritaskan pada pembangunan konektivitas nasional melalui pembangunan jalan.

Dalam tahun 2014 mendatang, kita akan lanjutkan peningkatan kapasitas jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 3.854,3 km. Kita juga akan melalukan preservasi jembatan sepanjang 329,9 km. Anggaran juga disediakan bagi pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih; penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, antara lain di daerah aliran sungai Bengawan Solo dan Kanal Banjir Timur; serta pembangunan rumah susun beserta infra-struktur pendukungnya.

Alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan juga kita prioritaskan untuk pembangunan konektivitas nasional melalui transportasi darat, laut, dan udara. Alokasi anggaran kementerian ini disinergikan erat dengan rencana investasi BUMN-BUMN terkait, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi di masing-masing sektor.

Selain tujuh Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran yang dominan di atas, terdapat sejumlah Kementerian Negara dan Lembaga yang memperoleh pagu alokasi anggaran yang juga cukup signifikan, termasuk Kementerian Pertanian. Untuk Kementerian Pertanian dialokasikan Rp 15,5 triliun, terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian.

Kementerian lain yang memperoleh alokasi yang cukup signifikan adalah Kementerian Dalam Negeri, yaitu sebesar Rp 14,8 triliun. Anggaran ini diarahkan terutama untuk meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan, melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas belanja Kementerian Negara dan Lembaga, alokasi belanja modal di tahun 2014 direncanakan mencapai Rp 205,8 triliun, atau naik 6,9 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2013.

Alokasi anggaran belanja modal kita prioritaskan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam menunjang program ketahanan energi, alokasi belanja negara juga disesuaikan dengan rencana investasi BUMN-BUMN terkait. Untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi akan dibangun tambahan pembangkit listrik, dan sarana pendukungnya.

Kita sadar, bahwa penggunaan energi alternatif harus didorong. Untuk itu -- dalam hal ini konversi

penggunaan gas -- akan dibangun perluasan jaringan gas dan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa; serta pembangunan kilang *mini plant* LPG.

Untuk mendukung program ketahanan pangan, dengan mengutamakan kemandirian dan kedaulatan pangan, alokasi anggaran belanja kita arahkan untuk pencetakan sawah seluas 40.000 hektar, pengembangan 260.000 hektar lahan, rehabilitasi 129.777 hektar jaringan irigasi, serta pembangunan 239 embung dan situ, serta pembangunan 21 waduk.

Hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah masalah lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam. Untuk itu, alokasi anggaran 2014 diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti rehabilitasi hutan pada daerah aliran sungai prioritas seluas 57.000 hektar, dan pembangunan hutan kota seluas 1.362 hektar. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendalian banjir.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Tujuan dari pembangunan ekonomi, pada akhirnya adalah perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. *Alhamdulillah*, kita telah membuat kemajuan dalam upaya mengurangi penduduk miskin. Seperti telah saya sampaikan, tingkat kemiskinan menurun dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,37 persen pada Maret 2013.

Namun kita tidak bisa berpuas diri. Karena itu pemerintah bekerja ekstra keras, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Kita tak bisa mengharapkan bahwa kemiskinan akan menurun hanya dengan efek menetes kebawah (ke bawah) atau *trickle down effect*. Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi pemerintah secara terukur, tepat sasaran dan sistematis.

Untuk itu kita alokasikan belanja bantuan sosial sebesar Rp 55,9 triliun, yang ditujukan terutama untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran juga kita cadangkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana.

Untuk memperkuat pelaksanaan empat klaster penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2014, kita akan tingkatkan program Bantuan Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Seperti kita ketahui, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran PKH sebesar Rp5,2 triliun, menjangkau sasaran sebanyak 3,2 juta RTSM.

Sejalan dengan itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan terus dilanjutkan. Program ini memiliki ciri khas karena langsung melibatkan masyarakat. Dengan model tersebut, kita tempatkan saudara-saudara kita tersebut sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Anggaran PNPM Mandiri kita alokasikan sebesar Rp 14,4 triliun, dengan rincian program PNPM Mandiri perdesaan sebesar Rp 9,3 triliun dengan sasaran 5.260 kecamatan, dan program PNPM Mandiri perkotaan sebesar Rp 2,0 triliun dengan sasaran 11.066 kelurahan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan perlindungan sosial (*social security*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam tahun 2014 kita mulai melaksanakan secara bertahap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran berupa Penyertaan Modal Negara pada masing-masing BPJS. Untuk tahun 2014, sebagai tahun pertama pelaksanaan sistem jaminan ini, khususnya jaminan kesehatan, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan upaya perbaikan. Langkah-langkah itu di antaranya, dengan meningkatkan kapasitas puskesmas-puskemas dan rumah sakit - rumah sakit pemerintah, terutama penambahan tempat tidur kelas III. Kita persiapkan pula penyediaan tenaga medis yang memadai, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Khusus bagi fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu, Pemerintah memberikan

bantuan iuran kepada mereka yang dikelompokkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tujuannya, agar dapat ikut serta dan terlayani oleh sistem jaminan sosial ini. Bagi kelompok masyarakat lainnya, mereka wajib membayar iuran dengan jumlah nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ditingkatkannya iuran PBI menjadi Rp19.225 per orang, per bulan, kita harapkan penyedia pelayanan kesehatan swasta makin aktif untuk ikut serta dalam penyediaan layanan kesehatan ini.

Seiring dengan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam tahun 2014 mendatang Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, baik PNS maupun TNI dan Polri, serta para pensiunannya. Pemerintah *insya* Allah, akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13, yang kita bayarkan pada pertengahan tahun anggaran. Selain itu, Pemerintah merencanakan penyesuaian gaji pokok PNS serta anggota TNI dan Polri sebesar 6 persen, dan pensiun pokok sebesar 4 persen untuk mengantisipasi laju inflasi.

Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran belanja pegawai kita rencanakan sebesar Rp 276,7 triliun, atau meningkat 18,8 persen dari belanja pegawai dalam APBNP tahun 2013.

Anggaran belanja non kementerian dan lembaga dalam RAPBN tahun 2014 yang direncanakan sebesar Rp 636,4 triliun, kita alokasikan antara lain untuk belanja subsidi dan pembayaran bunga utang. Anggaran belanja subsidi direncanakan sebesar Rp 336,2 triliun, yang berarti turun sekitar 3,4 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBNP tahun 2013. Anggaran sebesar itu kita alokasikan untuk subsidi energi dan non-energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk dan benih.

Selain itu, pada tahun depan, *insya* Allah, kita akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif yang keempat dalam era reformasi, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, untuk ketiga kalinya dalam sejarah demokrasi kita. Untuk mendukung terselenggaranya Pemilu 2014 secara demokratis, lancar dan aman, kita alokasikan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 17 triliun.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Tibalah saatnya saya menyampaikan rencana anggaran transfer ke daerah tahun 2014. Anggaran transfer ke daerah kita tujukan terutama untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk mendorong pemerintah daerah agar mengelola anggaran dengan sebaik-sebaiknya, pemerintah juga mengalokasikan Dana Insentif Daerah dan dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Dana-dana ini kita berikan kepada pemerintah daerah, sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan, dan juga untuk pemerintah daerah percontohan.

Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp 586,4 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 10,8 persen dari anggaran transfer ke daerah dalam APBNP tahun 2013.

Untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK Tambahan sebesar Rp 2,8 triliun, guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum dan sanitasi.

RAPBN tahun 2014 juga mengalokasikan anggaran bagi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Anggaran ini kita gunakan untuk membangun dan meningkatkan sejumlah ruas jalan darat, dari pesisir selatan hingga ke Pegunungan Tengah. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, dan memberdayakan perekonomian masyarakat.

Dana Otonomi Khusus kita rencanakan sebesar Rp 16,2 triliun, atau naik Rp 2,7 triliun dari anggarannya

dalam APBNP tahun 2013. Dana sebesar itu kita alokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Selain diberikan dana otonomi khusus, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 2,5 triliun. Pada kesempatan ini, saya sekali lagi minta agar Dana Otonomi Khusus benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya meminta agar pengawasan peman-faatan Dana Otonomi Khusus dapat makin ditingkatkan.

Seiring dengan wewenang, besarnya dana dan sumber daya yang harus dikelola oleh daerah, tanggung jawab pemerintah daerah juga semakin besar. Karena itu daerah bertanggung jawab untuk mengelolanya secara tertib demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pemerintah bersama aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, akan terus mengawal agar tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara,
Dengan total anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun dan jumlah belanja negara sebesar Rp 1.816,7 triliun, maka RAPBN tahun 2014 kita rencanakan tetap ekspansif, dengan defisit anggaran sebesar Rp 154,2 triliun atau 1,49 persen terhadap PDB. Jumlah defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2014 tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran dalam APBNP tahun 2013 yang mencapai 2,38 persen dari PDB. Penurunan defisit anggaran ini penting kita lakukan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih sehat dan berimbang di masa yang akan datang. Langkah itu merupakan bagian dari strategi kita untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai Kepala Pemerintahan yang insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada Presiden pengganti saya beserta pemerintahan yang dipimpinnya.

Untuk membiayai defisit anggaran, Pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Langkah itu kita lakukan dengan tetap berorientasi pada pembiayaan yang terjaga dan berkelanjutan, serta dengan menjaga risiko fiskal yang minimal. Sumber utama pembiayaan dalam negeri akan tetap berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sumber pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek.

Dalam tahun 2014, kita upayakan penurunan rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 22-23 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah negara-negara berkembang lainnya, yang mencapai 33 persen terhadap PDB. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Upaya ini memberi dampak kepada perbaikan peringkat utang Pemerintah, yang saat ini telah berada pada posisi *investment grade*. Untuk mempertahankan posisi itu, Pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan, dan kredibel, sesuai dengan standar internasional.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sesuai dengan amanah UUD tahun 1945, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai prioritas penyelenggaraan negara, meningkatkan martabat bangsa serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dapat dilakukan secara fleksibel, agar mampu menghadapi tantangan dan mencapai sasaran.

Namun demikian, dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, kita menghadapi tantangan *euphoria* pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu. Untuk memenuhi amanah penyelenggaraan Negara sesuai UUD 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang diamanatkan di UUD 1945, seperti dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD. Langkah bersama tersebut sangat penting bagi penyelenggara negara di waktu mendatang. Langkah itu penting untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional secara lebih baik

dan seimbang.

Di samping itu, saya juga berharap lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

Sebagaimana layaknya setiap bangsa, kita punya cita cita yang luhur dan mulia. Cita cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, mandiri, demokratis dan adil. Salah satu cara untuk meraih cita-cita itu adalah kesinambungan pembangunan ekonomi.

Dengan postur RAPBN tahun 2014 yang lebih siap dan antisipatif, dengan belanja modal dan infrastruktur yang terus meningkat, serta dengan langkah-langkah untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap*, kita memperkokoh perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan kedepan. Semua ini akan menjadi modal bagi pemerintahan berikutnya untuk, dapat menjaga kesinam-bungan pembangunan ekonomi.

Demikianlah penjelasan saya mengenai Pokok-Pokok Rancangan APBN Tahun 2014. Saya berharap pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2014 beserta Nota Keuangannya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan ini, maka penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten, Kota, dan Provinsi tahun 2014 juga dapat dilakukan tepat waktu.

Akhirnya, dengan hati yang tulus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan para anggota DPR-RI dan DPD-RI yang terhormat, atas segala perhatian dan dukungan, serta kerjasama yang baik selama ini dengan Pemerintah.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, lebih adil dan lebih sejahtera.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.